



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ZUDAN ARIF FAKRULLOH
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NIK : 144981

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 4.012.378.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m<sup>2</sup>/36 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 491.628.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m<sup>2</sup>/162 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 632.016.000
3. Tanah Seluas 197 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. Tanah Seluas 1609 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 952.770.000
5. Tanah Seluas 476 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 187.544.000
6. Tanah Seluas 588 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 231.672.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m<sup>2</sup>/36 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 446.748.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m<sup>2</sup>/100 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
9. Tanah Seluas 1330 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA MAGETAN, WARISAN Rp. 130.000.000
10. Tanah Seluas 305 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA MAGETAN, WARISAN Rp. 40.000.000
11. Tanah Seluas 250 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
12. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m<sup>2</sup>/100 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA



SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

13. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KAB / KOTA

SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 100.000.000

1. MOBIL, TOYOTA VIOS SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.

100.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 760.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.090.094.569

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 5.962.472.569

**III. HUTANG** Rp. 1.008.996.096

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 4.953.476.473

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT UTAMA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : IMAS SUKMARIAH  
2. Jabatan : SEKRETARIS UTAMA  
3. NHK : 187248

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.255.050.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/150 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI , WARISAN , Rp. 1.500.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/45 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
3. Tanah Seluas 90 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 155.050.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>939.000.000</b>
1. MOBIL, RENAULT TRIBER RXZ AT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 154.000.000		
2. MOBIL, SUZUKI XL 7 XL7415 F GL (4X2) ZETA A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 233.000.000		
3. MOBIL, WULING MINIBUS Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 398.000.000		
4. MOBIL, SUZUKI BU4FL (4X2) A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 154.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>9.500.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>498.606.859</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.702.156.859</b>



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.702.156.859

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)  
**UNIT KERJA** : DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SUHARMEN
2. Jabatan : DEPUTI
3. NHK : 211571

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **4.470.320.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/185 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Bangunan Seluas 36 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
4. Tanah Seluas 7966 m2 di KAB / KOTA BANJARNEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 155.320.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 510 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.550.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **567.500.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, VESPA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 45.500.000
3. MOBIL, TOYOTA TLC BJ40 Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000



4. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.  
220.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 402.700.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 967.286.804

F. HARTA LAINNYA Rp. 412.610.000

Sub Total Rp. 6.820.416.804

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.820.416.804

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG : EKSEKUTIF**

**LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)**

**UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **NUR HASAN**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **675547**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 143 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 101.000.000

1. MOBIL, HONDA BRIO/SATYA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 2BJ Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 29.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 22.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 952.000.000

**III. HUTANG** Rp. 385.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 567.000.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.